

STRATEGI PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang)

M. Helmi Watoni Satka¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang dan untuk mengetahui faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Kerta Buana. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menurut Matthew B Miles dan A. Michael Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana, meliputi pembinaan di bidang kewiraswastaan, penyuluhan yang disampaikan oleh kepolisian, memberikan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembentukan ikatan remaja mesjid, pengadaan posyandu rutin setiap bulannya.

Kesimpulannya pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat masih kurang berjalan dengan baik, karena dalam pelayanan publik terjadinya keterlambatan pelayanan dan masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Melaksanakan pembangunan di desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : tonisatka32@gmail.com

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan observasi di Desa Kerta Buana, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari segi infrastruktur masih terdapatnya badan jalan yang belum melakukan pengerasan (aspal/semenisasi) dimana saat musim hujan jalan berlumpur sedangkan musim kemarau jalan berdebu sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat Desa Kerta Buana, gedung pelayanan publik yang terbuat dari kayu seperti posyandu dan kantor desa, sarana prasarana gedung sekolah yang mengalami kerusakan seperti kursi dan meja, sering terjadi banjir pada musim hujan akibat sarana gorong-gorong yang tidak memadai. Adapun dari segi suprastruktur yaitu masih terdapat anak-anak yang usia sekolah mengalami putus sekolah yaitu hanya sampai SMP maupun SD dan terkadang terjadi perkelahian antar remaja.

Padahal diketahui sejak tahun 2013 banyak sekali penduduk yang datang dikarenakan banyaknya lapangan usaha yang muncul akhir-akhir ini terutama dari sektor pertambangan yang sangat menarik penduduk dari luar wilayah untuk bekerja di wilayah ini.

Terkendalanya program pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di Desa Kerta Buana dapat terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana masyarakat kurang kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, masyarakat kurang percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya dan masyarakat terlalu cepat puas terhadap diri sendiri. Sehingga perlunya strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat baik dari segi ekonomi, hukum, agama dan kesehatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan terhadap masyarakat dalam bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat meliputi pikiran, tenaga dan barang/uang. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, khususnya bagi pemerintah di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Strategi

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pengertian Desa

Wasistiono dan Tahir (2006:7) mengemukakan kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2004:20) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Strategi Pemerintah Desa

Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung

jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut (Mondong, 2011:8) :

1. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi
2. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum
3. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama
4. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan
5. Pelayanan terhadap masyarakat

Pembangunan

Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Mondong, 2011:5-6).

Partisipasi

Davis dalam Ndraha (2007:37) mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggung jawab.

Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton dalam Soekanto, (2006:22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang mengacu dalam Harahap dkk (2007:48) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Definisi Konsepsional

Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh kepala desa beserta aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pelaksanaan program melalui pembinaan

terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Menurut Moleong (2003:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Fokus Penelitian

1. Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan fokus yaitu, sebagai berikut :
 - a. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi.
 - b. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum.
 - c. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama.
 - d. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan.
 - e. Pelayanan terhadap masyarakat.
 - f. Pengembangan terhadap masyarakat.
2. Faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Sumber Data

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :
 - a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Desa Kerta Buana.
 - b. Informan terdiri dari :
 - 1) Sekretaris desa
 - 2) Kaur Pemerintahan
 - 3) Kaur Pembangunan
 - c. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Kerta Buana, yang terdiri dari:
 - 1) Ketua RT. 10
 - 2) Kepala Dusun I
 - 3) Ustad di Desa Kerta Buana
 - 4) Kepala Puskesmas Separi I
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen

- b. Buku-buku ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Pengumpulan data.
2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang

Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang dijabarkan lebih rinci dengan fokus yaitu pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat.

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Kerta Buana dengan pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan.

Dimana selama ini masyarakat Desa Kerta Buana sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di Desa Kerta Buana. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam

menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangunan desa sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum di Desa Kerta Buana seperti perkelahian antar remaja, penggunaan narkoba dan lain sebagainya dengan mengadakan penyuluhan yang disampaikan oleh kepolisian terdekat bekerja sama dengan pihak terkait.

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah Desa Kerta Buana dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara.

Pembangunan dengan pembinaan dalam bidang hukum tersebut dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepala Desa Kerta Buana tersebut, untuk mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat sebagai berikut melalui koordinasi yang digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa. Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebar luaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh hukum tua sebagai penanggungjawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturan-peraturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD. Dialog, membuka forum-forum dialog antara

pemerintah desa dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra BPD, LPMD, dan PKK masing-masing memberikan kontribusi positif guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemerintah dalam pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama di Desa Kerta Buana melalui dengan memberikan fasilitas kegiatan keagamaan seperti pembuatan mesjid, penambahan alat-alat ceramah keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid, pengadaan yasinan yang diikuti ibu-ibu dan bapak-bapak.

Fasilitasi kegiatan keagamaan di Desa Kerta Buana ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat ceramah agama yang biasanya didatangkan dari luar desa. Dilaksanakan pula kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturahmi dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin diadakan setiap minggu yang disertai dengan ceramah agama yang biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Tujuan dari pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda.

Pembangunan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika masyarakat dalam kondisi damai dan rukun. Kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan akan banyak mengalami gesekan antar individu dan kelompok sehingga perlu dilakukan pembinaan yang terprogram dengan baik dan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat di mana mereka memiliki norma dan nilai yang menjadi basis pandangan hidup mereka sebagai kearifan lokal.

Pemerintah desa mengemban tugas dengan usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan. Keberhasilan pemerintah desa dalam membina masyarakatnya akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan secara positif. Demikian pula sebaiknya kegagalan seorang kepada desa dalam membina masyarakatnya berarti mencerminkan kurang baiknya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menentukan keberhasilan membina masyarakat desa khusus dalam bidang keagamaan maka pemerintahan desa mutlak diperlukan dan sangat menentukan karena mereka adalah orang yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah desa ataupun kepala desa merupakan pimpinan sekaligus sesepuh masyarakat.

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemerintah dalam pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Kerta Buana melalui pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, meningkatkan kerjasama antara

bidan dengan dukun dalam membantu proses persalinan dan memberikan penyuluhan mengenai PHBS. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Desa Kerta Buana yaitu Posyandu dan Puskesmas Pembantu.

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pemerintah Desa Kerta Buana dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan suatu program.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerta Buana dalam bidang kesehatan untuk mengurangi kesakitan yaitu dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di setiap dusun yang ada di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap bulan di adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui, nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, bcg, dpt, oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa dan juga di Desa Kerta Buana ini telah dibangun PUSKESDES (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa secara gratis bagi yang memiliki kartu keluarga dan KTP. Apabila tidak menunjukkan kedua identitas tersebut maka pasien akan dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp.5.000,- ini membuktikan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak kesehatan sangat erat demi terlaksananya tertib administrasi di bidang pemerintahan desa.

Begitupula di Desa Kerta Buana ini telah dibangun kerjasama antara bidan dan dukun dimana setiap ibu hamil yang akan melahirkan telah diberi pengertian dan pembinaan agar bila nanti melahirkan ibu hamil tersebut melaporkan kepada dukunnya dan dukun tersebut menyampaikan kepada bidan desa karena yang akan melayani persalinan adalah tenaga medis dan yang melaksanakan adat atau kebiasaan masyarakat adalah dukun. Jadi proses melahirkan ditangani oleh bidan dan proses jampi-jampi dilakukan oleh dukun tersebut. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah desa sangat peduli bagaimana pentingnya kebersamaan dalam melaksanakan segala kegiatan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat dan di desa ini juga di adakan penyuluhan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang dilaksanakan oleh tim penggerak PPK Desa bekerjasama dengan bagian Sanitarian Puskesmas Safari 1, dimana dalam pembinaan ini masyarakat diajak untuk membuat jamban agar BAB pada tempatnya dan cuci tangan sebelum makan, makanan harus ditutup, bak mandi

harus dibersihkan dan masalah kesehatan yang lain yang dapat merusak kesehatan masyarakat.

Pelayanan terhadap masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kerta Buana melalui penerapan SOP yaitu masih kurang berjalan dengan baik, karena dalam pelayanan publik terjadinya keterlambatan pelayanan akibat kurang produktifitasnya pegawai dan fasilitas kerja yang tidak menunjang seperti komputer yang rusak.

Produktifitas kerja aparat pemerintah merupakan hubungan antara kualitas yang dilakukan untuk mencapai hasil, dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud diperlukan aparatur pemerintah yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Prosedur tetap pelayanan yaitu berdasarkan SOP (*Standart Operating Procedur*) administrasi di Desa Kerta Buana. Sehingga aparat dapat menyelesaikan tugas pekerjaan dengan cukup baik. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan mencari alternatif pola kerja terbaik untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, yang mana aparat dalam bertugas hanya berdasarkan prosedur yang berlaku. Sehingga banyak pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tertunda dikarenakan kurangnya berkas, seperti halnya dalam pengurusan pembuatan KTP baru dan perpanjangan yang salah satu syarat yang jarang dipenuhi masyarakat yaitu fotocopy tanda lunas PBB tahun yang berjalan. Ditunjang sebagian besar petugas dalam mempergunakan fasilitas kerja sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu mengalami kesulitan terutama dalam penggunaan komputer dan komputer yang ada di Kantor Desa sudah mulai rusak.

Aparat dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Selama ini aparat telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Aparat tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya.

Sehingga perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang bersangkutan agar tercipta suasana yang kondusif demi kelancaran kinerja dalam melayani masyarakat dan aparat harus lebih kompeten lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan pimpinan dapat memberikan wewenang kepada bawahan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja organisasi apabila sedang tidak berada di Kantor Desa, dengan pelimpahan sebagian wewenang dari

pimpinan kepada pegawai diharapkan tugas pekerjaan dalam penyelesaiannya dapat tercapai dengan baik.

Pengembangan terhadap masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan masyarakat di Desa Kerta Buana yaitu masih kurang, karena masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana. Adapun strategi yang diterapkan pemerintah Desa Kerta Buana yaitu dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan. Sehingga terbuka pemikirannya apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa.

Pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka, yang kedepannya dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan desa. Dimana pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu masyarakat dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Pengembangan masyarakat adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pengembangan masyarakat mempunyai tiga tahapan yaitu tahap pertama penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun) dikembangkan, dan proses pengembangan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengembangkan masyarakat agar turut berpartisipasi melalui peningkatan sumber daya dan keterampilan dengan memberikan pelatihan agar pemikirannya terbuka apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa khususnya meningkatkan hidup masyarakat itu sendiri.

Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat strategi pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masih kurang baiknya sikap mental masyarakat dan pendidikan masyarakat yang tergolong rendah.

Kendala-kendala ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi faktor penghambat strategi pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran masyarakat

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparat pemerintah desa.

2. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan warga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerta Buana, khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah karena kebanyakan dari mereka adalah tidak tamat SD.

3. Sikap mental masyarakat

Faktor tradisi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat memang selalu ada seperti berpesta, hidup boros, dan bermalas-malasan dalam melakukan hal-hal yang kurang berguna maupun dalam menghargai waktu yang terus berjalan dan terus berlalu itu. Namun hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat setempat untuk berbuat atau melakukan suatu karya atau apapun yang menurut mereka berguna bagi diri mereka sendiri maupun untuk keluarga bahkan untuk lingkungan mereka. Memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk dirubah karena sudah tertanam dalam jiwa mereka, tinggal bagaimana pemerintah desa dapat memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan apabila terdapat hal-hal yang positif atau faktor tradisi-tradisi positif masyarakat seperti kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa

tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, belum sepenuhnya terbuka dan transparan disamping itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang tersebut di atas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat mana yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasinya akan lebih tinggi.

PENUTUP

1. Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana secara umum sudah cukup baik yaitu meliputi bidang ekonomi dengan pembinaan di bidang kewiraswastaan, bidang hukum dengan mengadakan penyuluhan mengenai narkoba dan perkelahian antar pelajar yang disampaikan oleh kepolisian, bidang agama dengan memberikan alat-alat ceramah keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid dan pengadaan yasinan, bidang kesehatan dengan pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya PHBS. Akan tetapi pelayanan publik dan pengembangan masyarakat masih kurang baik, karena sering terjadinya keterlambatan pelayanan dan masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana.
2. Faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masih kurang baiknya sikap mental masyarakat dan pendidikan masyarakat yang tergolong rendah.

Saran

1. Pemerintah Desa Kerta Buana diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring serta lebih memperhatikan perimbangan jumlah penduduk menurut lapisan usia, pendidikan dan pekerjaannya, sehingga seluruh aspirasi dapat tertampung dan terwakili.
2. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerta Buana masih tergolong rendah karena kebanyakan dari mereka adalah tidak tamat SD. Oleh karena itu diharapkan pemerintah lebih aktif memberikan pendidikan kepada masyarakat

dalam bentuk penyuluhan, agar pengetahuan masyarakat bertambah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Sikap mental masyarakat Desa Kerta Buana yang cenderung menyerahkan pembangunan desa kepada pemerintah desa tanpa campur tangan masyarakat membuat lambatnya pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengubah mental masyarakat yang masih negatif dalam pembangunan desa dengan menumbuhkan rasa semangat dan kesadaran dalam menjunjung tinggi dan mengembangkan karakter manusia yang unggul dalam bermoral dan menjaga nilai-nilai kebudayaan menuju perubahan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Marrus, Stephanie. 2002. *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley. USA.
- Moleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mondong, Hendra. 2011. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. USU. Medan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya Dharma. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahrir. 2006. *Proyek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Jatinagor.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.